

KEGIATAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA DALAM MENENTUKAN LABA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) KOTA DENPASAR

Gine Das Prena¹
Ketut Tanti Kustina²

¹Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, Bali, Indonesia
Email : ginedp@yahoo.com

²Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, Bali, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan sosial, budaya, dan kegiatan agama yang dilakukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam menunjang laba. Penelitian dilakukan di seluruh LPD yang tersebar di Kota Denpasar total populasi yang digunakan adalah tiga puluh (30) LPD, yang tersebar di Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Selatan, Denpasar Barat dan Denpasar Utara, dengan menyebarkan kuisioner pada pengurus LPD. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan teknik analisa regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan sosial, budaya, dan agama berpengaruh signifikan terhadap Laba LPD. Selain itu, secara bersama – sama kegiatan sosial, budaya, agama ikut menunjang laba lembaga perkreditan desa di Kota Denpasar. Implikasi penelitian ini bagi lembaga perkreditan desa, diupayakan untuk terus meningkatkan pemberdayaan labanya untuk kegiatan sosial, budaya, dan agama yang dilaksanakan di desa dimana mereka melaksanakan usahanya

Kata Kunci : Sosial, budaya, agama, laba lembaga perkreditan desa (LPD)

ABSTRACT

This study aimed to determine the social activities, cultural activities, religious activities conducted LPD in supporting its profit. The study was conducted overall the population of thirty LPD, which spread in Denpasar District East, South Denpasar, Denpasar Denpasar West and North, by spreading questioner on board LPD. Research hypothesis testing using multiple linear regression analysis. Based on the survey results revealed that the social, cultural, and religious activities significantly influence the success of LPD. In simultant, social, cultural, religious, activities are participate to the success of LPD in the city of Denpasar. The implication of this research is social, cultural, religious proven the success of the credit institutions participating in Denpasar village, then the village credit institutions are expected to continue to increase the empowerment of its profits to social activities, culture, and religion held in where LPD operate.

Keywords: Social activities, cultural activities, religious activities, LPD profit

PENDAHULUAN

Denpasar sebagai kota perdagangan dan merupakan ibu kota provinsi Bali merupakan kota dengan beribu penduduk dan telah menjadi wilayah bisnis yang luas. Sebagian besar wilayah merupakan dataran rendah berada pada ketinggian 0.75 meter di atas permukaan laut. Secara administratif Kota Denpasar terdiri dari 4 kecamatan yang mewilayahi 43 desa dan kelurahan. Sejalan dengan perkembangan informasi dan teknologi tidak serta merta menggeser paradigma kota yang pada mulanya terdiri dari desa-desa tradisional dengan penduduk dominan beragama Hindu. Keunikan kebudayaan dan kekhasannya yang tumbuh dari jiwa agama Hindu dengan keseniannya yang bercirikan sosial religius. Memiliki akar budaya yang sangat kuat dan aktifitas keagamaan yang tinggi sehingga merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah. Menyadari hal tersebut diatas maka, Kota Denpasar diarahkan pada “Terciptanya Kota Denpasar Berwawasan Budaya”. Beberapa program prioritas pembangunan era otonomi daerah telah memberi peluang bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang ada secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Dasar pemikiran tersebut membawa pihak pemerintah setempat memperbolehkan pihak desa yang diayomi

dengan keberadaan hukum adat yang kuat dapat mengelola sistem keuangan dan sistem pendanaanya sendiri. Hal inilah yang mendorong terciptanya Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Dimana desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya, sehingga perlu diayomi, dilestarikan dan diberdayakan. Dalam kegiatan masyarakat desa banyak diatur oleh adat istiadat, norma – norma, upacara dan agama. Banjar merupakan suatu kelompok sosial yang menjadi pusat orientasi masyarakat desa untuk melakukan kegiatan guna menumbuhkan sifat solidaritas, gotong royong dan rasa kebersamaan dari warga desa. Dengan kemajuan kota Denpasar yang semakin pesat serta untuk mendukung program Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera (Mandara) maka banyak tumbuh dan berkembang sekaa – sekaa dan pasraman. Sebagai daerah wisata budaya kota Denpasar dihadapkan pada tantangan dan modernisasi sehingga perlu menumbuhkan kreatifitas sosial guna melestarikan budaya dan agama bagi masyarakat desa.

Agama Hindu merupakan agama yang dekat dengan alam dimana acara keagamaannya banyak dilakukan di alam terbuka; sesuai filsafat Hindu yang menekankan pada keseimbangan dan keserasian alam. Masyarakat dalam hal ini memiliki peranan penting sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan agama seperti pelestarian nilai agama Hindu di kalangan warga desa adat. Untuk mewujudkan tujuan dan hakekat hidup yang menyangkut aspek sosial, budaya dan

agama perlu dikembangkan melalui refitalisasi lembaga – lembaga tradisional sehingga mampu menampung aspirasi masyarakat. Untuk mengembangkan hal tersebut maka perlu adanya dukungan dana. Salah satu lembaga keuangan yang ada di desa adat yang mampu mengatasi permasalahan keuangan adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga ini berfungsi sebagai badan simpan pinjam milik desa adat, guna meningkatkan pemahaman masyarakat krama desa dalam upaya menjaga dan memelihara nilai-nilai adat budaya masyarakat desa agar keberadaannya tetap stabil. Berkaitan dengan fungsi LPD diatas maka LPD yang ada di Kota Denpasar berusaha untuk dapat menghasilkan laba dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 yang dapat dilihat pada tabel 1. Perkembangan laba/keberhasilan lembaga perkreditan desa di Kota Denpasar dari tahun 2009-2012 sebagai berikut.

Tabel 1.
Perkembangan laba/keberhasilan lembaga perkreditan desa di Kota Denpasar dari tahun 2009-2012

No.	Tahun	Keberhasilan / laba (Rp.)
1.	2009	136.914.195,00
2.	2010	150.724.761,00
3.	2011	159.944.172,00
4.	2012	170.681.302,00
	Jumlah	618.264.430,00

Sumber : Pembina Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten / Kota (PLPDK), 2014

Berdasarkan uraian latar belakang masalah berdasarkan adat istiadat yang dijiwai ajaran agama hindu dan nilai-nilai budaya maka permasalahan yang teridentifikasi adalah : (1) Apakah kegiatan sosial menunjang Laba lembaga perkreditan desa di kota Denpasar ?, (2) Apakah kegiatan budaya menunjang Laba lembaga perkreditan

desa di kota Denpasar ?, (3) Apakah kegiatan agama menunjang Laba lembaga perkreditan desa di kota Denpasar ?

Berdasarkan perumusan pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah kegiatan sosial menunjang laba Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar. Mengetahui apakah kegiatan budaya menunjang laba Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar. Mengetahui apakah kegiatan agama menunjang laba Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar.

Teori Pensinyalan menurut Brigham dan Houston (2001: 39) merupakan suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. *Teori pensinyalan* menjelaskan alasan perusahaan memiliki insentif untuk melaporkan secara sukarela informasi kepasar modal maupun pihak *stake holder (masyarakat)* meskipun tidak ada mandat dari badan regulasi. Pelaporan informasi oleh manajemen bertujuan untuk mempertahankan investor maupun persepsi masyarakat yang tertarik pada badan (perusahaan). Informasi keuangan yang disampaikan badan (perusahaan) bertujuan untuk mengurangi *information asymmetry* antara perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan (Wolk et al. 2001).

Teori yang dapat digunakan untuk memahami hubungan antara manajemen dan pemilik perusahaan adalah teori keagenan. Teori keagenan berusaha menjelaskan hubungan antara agen (manajemen perusahaan) dan prinsipal (pemilik perusahaan).

Dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak yang mana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976).

Konflik kepentingan yang disebabkan oleh kemungkinan agen tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal dapat mendorong timbulnya biaya keagenan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan ada tiga jenis biaya keagenan yaitu biaya monitoring, biaya *bonding* dan biaya kerugian residual. Prinsipal dapat membatasi divergensi dari kepentingannya dengan menetapkan insentif yang layak dan dengan mengeluarkan biaya monitoring. Biaya monitoring tersebut dirancang untuk membatasi aktivitas-aktivitas menyimpang yang dilakukan oleh agen. Dalam kondisi tertentu, agen dimungkinkan untuk membelanjakan sumber daya perusahaan (biaya *bonding*) untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak yang dapat merugikan prinsipal atau untuk meyakinkan bahwa prinsipal akan memberikan kompensasi jika dia benar-benar melakukan tindakan tersebut. Nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kesejahteraan yang dialami oleh prinsipal juga merupakan biaya yang timbul dari hubungan keagenan, biaya tersebut sebagai kerugian residual (*residual loss*).

Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang

diinginkan , pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995 dalam Kirana, 2009).

Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan. O'Donovan (2000) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian legitimasi memiliki anfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (society), pemerintah individu dan kelompok masyarakat, Gray et al (1996: 46) dalam Ahmad dan Sulaiman (2004). Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat. Operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan dari masyarakat. Deegan, Robin dan Tobin (2002) dalam Fitriyani (2012) menyatakan legitimasi dapat diperoleh.

Retzer (2003) menyatakan bahwa paradigma sosial adalah salah satu aspek yang sangat khusus, dalam analisis tentang tindakan sosial (*social action*). Konsep ini tidak memisahkan antara struktur sosial dengan pranara sosial. Kedua hal ini membantu membentuk tindakan manusia yang penuh arti atau penuh makna. Paradigma perilaku sosial dalam Ilmu Sosial sudah dikenal sejak lama, khususnya dalam psikologi.

Menurut Immanuel (1997) Ilmu Sosial adalah salah satu pewaris kearifan. Meskipun ia merupakan ahli waris yang tidak pernah bersyukur serta menyangkal "leluhurnya" dikatakan demikian sebab Ilmu Sosial pernah didefinisikan dirinya sebagai upaya pencarian kebenaran-kebenaran yang menghampiri kearifan yang telah ada atau yang telah dideduksikan. Jadi Ilmu Sosial adalah usaha penjelajahan dunia modern, yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosial, dimana membentuk struktur sosial yang terjadi pada masyarakat yang mempunyai mobilisasi terbuka terhadap penyimpanan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu. Sedangkan integrasi sosial diperlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi tantangan.

Menurut Campbell (1994) bahwa kehidupan manusia tak terpikirkan diluar masyarakat individu dan tak bisa hidup dalam keterpencilan. Manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup dan untuk mengaktualisasi diri sebagai manusia. Craib (1986) menyatakan bahwa realisme tindakan sosial adalah penyebaran dan penggunaan, makna-makna dalam membentuk sikap, maksud dan tindakan. Hal ini mencakup penjelasan yang jelas, interaksionalisme simbolik membawa kita kearah pembicaraan dari proses ini, sedangkan etnometodologi memberikan beberapa langkah untuk mengidentifikasi aturan-aturan yang diikuti.

Gorda (1999) menyatakan pengertian tentang proses yang merupakan suatu rangkaian perbuatan manusia yang mengandung maksud tertentu dan memang dikehendaki oleh orang yang melakukan kegiatan itu secara terus menerus. Dengan

demikian pengertian proses diatas memberi informasi bahwa kegiatan mencapai tujuan secara bertahap dan berkelanjutan. Kegiatan sosial adalah kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung melayani masyarakat dan memberikan jaminan sosial untuk membentuk tindakan-tindakan yang penuh makna. Kegiatan budaya adalah kegiatan yang terdapat dalam masyarakat dan ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Kegiatan agama adalah usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna keberadaan alam semesta yang dapat meningkatkan kebahagiaan bathin. Geria (2000) para ahli Ilmu Humaniora berpendapat bahwa kebudayaan memiliki fungsi yang sangat hakiki bagi kehidupan manusia, secara individu maupun kolektif. Secara individual, kebudayaan berfungsi membentuk kepribadian dasar, harkat dan martabat kemanusia. Secara kolektif, kebudayaan berfungsi sebagai perekat solidaritas kelompok, pemberian identitas dan wawasan dalam segenap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kebudayaan Bali merupakan bagian kebudayaan Indonesia yang bersifat Bhineka Tunggal Ika, dalam masa terakhir ini memperlihatkan perubahan yang sangat pesat. Fenomena internal yang mendorong perubahan adalah struktur masyarakat agraris kemasyarakat industri dan perubahan ekologi daerah Bali. Fenomena eksternal yang mendorong perubahan mencakup dampak revolusi dan intensifnya sentuhan peradaban global.

Menurut Mantra (1993) untuk menentukan berbagai program prioritas dalam pembacaan dan pengembangan kebudayaan nasional perlu pengertian kebudayaan.

Dalam kebiasaan sehari-hari kita menyebutkan seseorang sebagai insan yang berbudaya apalagi memiliki sikap yang matang, bisa membaca yang baik, mempunyai ketrampilan berbagai bahasa, dan dapat bercakap-cakap yang baik mengenai kesenian, baik seni rupa maupun seni pertunjukan. Kebudayaan merupakan cara hidup suatu kelompok masyarakat. Manifestasi suatu kebudayaan sangat beragam wujudnya dari satu tempat ke tempat lainnya, namun keragaman tidak berarti bahwa satu kebudayaan lebih baik dari pada kebudayaan lain.

Seperti halnya Bali yang merupakan Pulau Dewata penuh dengan panorama alam dan memiliki seni budaya. Suku bangsa Bali merupakan salah satu dari aneka ragam suku bangsa yang berdomisili di kepulauan nusantara. Suku bangsa Bali merupakan suatu kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran akan kesatuan kebudayaan, baik kebudayaan daerah Bali, maupun kebudayaan Nasional Indonesia. Rasa kesadaran akan kesatuan, kebudayaan Bali diperkuat oleh adanya kesatuan bangsa, kesatuan agama Hindu.

Orang Bali, seperti dikemukakan oleh Geertz (1959) sangat terikat kepada sistem sosial dan budaya. Mereka terikat sekurang-kurangnya pada tujuh segi kehidupan sosial budaya, yaitu sebagai berikut : pura pemuja, komunitas setempat (banjar, desa adat), organisasi subak bagi para petani, sejumlah sekaa atau organisasi sukarela, ikatan kerabat, ikatan kasta. kesatuan administrasi (desa). Kebudayaan Bali tumbuh dan berkembang melalui perjalanan yang cukup panjang dalam kerangka sistem kebudayaan nasional. Secara khusus fenomena ini mempunyai arti bagi

eksistensi dan perkembangan kebudayaan Bali dimana kebudayaan Bali terjalin dengan agama Hindu sejak permulaan Masehi yang kemudian menumbuhkan kreatifitas budaya di kalangan masyarakat Bali. Dalam kenyataan konsep Tri Murti telah berhasil menyatukan tiga unsur kehidupan kemasyarakatan di Bali. Ketiga unsur tersebut adalah unsur ketuhanan (khayangan tiga), unsur wilayah (pelemahan) unsur manusia (pawongan) yang dikenal sebagai Tri Hita Karana.

Akuntansi merupakan suatu area aktivitas ekonomi dengan tingkat regulasi yang sangat tinggi (Scott, 2000). Pemerintah secara langsung terlibat dalam regulasi melalui hukum atau undang-undang yang mengatur profesi akuntansi dan melalui peraturan tentang pengungkapan minimum dalam laporan keuangan dan prospektus. Terdapat tiga alasan diperlukan regulasi, yaitu kegagalan pasar, keinginan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Beberapa sumber kegagalan pasar, antara lain informasi sebagai barang publik dan asimetri informasi (Buckley & O'Sullivan, 1980; Cooper & Keim, 1983; Watts & Zimmerman, 1986; Wolk & Tearney, 2001; dan Scott, 2000). Suatu barang disebut barang publik jika barang tersebut dapat dikonsumsi oleh satu atau beberapa orang, tanpa mengurangi jumlah yang dikonsumsi oleh lainnya (Davis & Meyer, 1983). Artinya keuntungan (*benefits*) barang publik dapat dinikmati oleh sejumlah besar individu.

Healy dan Palepu (2001) menyatakan bahwa regulasi pengungkapan lebih dimotivasi oleh perhatian (*by concern*) dibandingkan dengan kegagalan pasar,

artinya regulasi ditekankan untuk melindungi investor yang *unshophisticated*. Penetapan pengungkapan minimum dimaksudkan untuk mengurangi *information gap* antara investor yang *informed* dengan *uninformed*. Regulasi dimaksudkan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik (Cooper & Kim 1983). Sedangkan Wolk dan Tearney (1997) menyatakan bahwa regulasi diperlukan karena kegagalan pelaporan keuangan dan auditing.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan perusahaan digunakan oleh investor untuk pembuatan keputusan investasinya. Selain investor, laporan keuangan juga digunakan oleh pihak-pihak lain untuk membuat keputusan sesuai dengan kepentingan pihak tersebut. Penyampaian informasi keuangan sesegera mungkin kepada publik dapat mempengaruhi aktivitas pasar dan harga sekuritas perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI. Pada Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dinyatakan secara jelas bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental lainnya kepada Bapepam.

Pada tahun 1996, Bapepam mengeluarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-80/PM/1996, yang mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan auditor independennya kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan.

Ketentuan yang lebih spesifik tentang pelaporan perusahaan publik diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-38/PM/2003 tentang Laporan Tahunan yang berlaku sejak tanggal 17 Januari 1996. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2006, untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada publik, diberlakukanlah Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik.

Sejak tanggal 30 September 2003, Bapepam semakin memperketat peraturan dengan dikeluarkannya Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 ini menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan dan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.6 dinyatakan bahwa dalam hal penyampaian laporan tahunan dimaksud melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan.

Mahasiswa Program Studi Magister Program Ilmu Sosial Bidang Kajian Utama Ilmu Pemerintahan Universitas Pajajaran Bandung 2002, I Nyoman Mariada melaksanakan Penelitian tentang Pengaruh Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung belum maksimal. Hal ini secara langsung berpengaruh terhadap belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang disebabkan bantuan pinjaman yang diberikan belum maksimal. Sehingga terdapat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung dimana semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung.

Penelitian selanjutnya mahasiswa program Megister Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Denpasar 2009, I Kadek Dwi Laba melaksanakan penelitian tentang evaluasi kinerja lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Celuk Sukwati Gianyar. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kinerja lembaga perkreditan Desa menunjukkan bahwa dalam mendapatkan laba tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari rentabilitas melebihi target sebesar 1,5%. Berdasarkan Loan Deposite Rasio Lembaga Perkreditan Desa termasuk katagori sehat, namun apabila dilihat dari tingkat likwiditasnya mengalami peningkatan, namun masih dibawah target minimal. Hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁: Kegiatan sosial yang dilakukan LPD di masyarakat kota Denpasar mampu menunjang laba lembaga perkreditan desa.

H₂: Kegiatan budaya yang dilakukan LPD di masyarakat Kota Denpasar mampu menunjang laba lembaga perkreditan desa.

H₃: Kegiatan Agama yang dilakukan LPD di masyarakat Kota Denpasar mampu menunjang laba lembaga perkreditan desa.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan quisioner terdiri dari kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan agama yang ada di desa. Sedangkan Sumber data pada penelitian ini meliputi : data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yaitu Pembina Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten / Kota (PLPDK). Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu lembaga perkreditan desa sekota Denpasar.

Penelitian akan dilakukan di Kota Denpasar, dengan jumlah LPD sebanyak 30 LPD. Tersebar di Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Selatan, Denpasar Barat dan Denpasar Utara, dengan menyebarkan quisioner pada pengurus LPD. Untuk keberhasilan (laba) dapat dilihat perkembangan LPD kota Denpasar dalam periode tahun 2009 – 2012 dalam laporan rugi / laba pada Pembina Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten/Kota (PLPDK).

Variabel dependen atau variable terikat dalam penelitian ini adalah Laba LPD (Lembaga Perkreditan Desa). Laba LPD yang dimaksud adalah kemampuan LPD dalam menghasilkan laba bersih usaha pada laporan keuangan tahunan yakni setelah tanggal 31 Desember. Variabel independen atau variable bebas dalam penelitian ini adalah jumlah yang dikeluarkan oleh pihak LPD ke Desa setempat melalui item kegiatan sosial. Jumlah yang dikeluarkan oleh LPD ke Desa setempat melalui item

kegiatan keagamaan dan jumlah yang dikeluarkan oleh LPD ke Desa setempat melalui item kegiatan kebudayaan.

Laba LPD merupakan selisih antara jumlah pendapatan dengan jumlah biaya pada satu periode pembukuan pada lembaga perkreditan desa (LPD) jumlah laba dapat mewakili suatu kinerja LPD dimana semakin tinggi laba yang dihasilkan dalam satu periode berarti semakin baik kinerja LPD pada kurun waktu tersebut. Kenaikan laba pada lembaga perkreditan desa sangat tergantung dari peran serta masyarakat desa sekitar untuk memanfaatkan fasilitas produk yang dimiliki oleh LPD. Kegiatan Sosial merupakan sumbangsih Lembaga Perkreditan Desa terhadap kegiatan sosial yang dilakukan di desa setempat. Bentuk kegiatan sosial yang dilakukan LPD kepada masyarakat desa dapat berupa peranserta dalam kegiatan keluarga berencana, penanggulangan anak putus sekolah, pembinaan terhadap korban penyalahgunaan narkoba, penyuluhan kegiatan lansia, peningkatan pelayanan posyandu, bantuan bagi keluarga miskin, gotong royong, bantuan bagi penyandang cacat dan pemeriksaan kesehatan di Desa

Kegiatan budaya merupakan sumbangsih Lembaga Perkreditan Desa terhadap kegiatan budaya bagi desa setempat yang meliputi peran serta pada kegiatan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, peningkatan mutu pendidikan dasar, peningkatan mutu pendidikan umum (SMU), peningkatan mutu SMK, peningkatan mutu sekaa, kegiatan pesraman anak-anak desa, penanganan sampah desa, peningkatan sanggar tari desa dan usaha peningkatan kebersihan desa. Kegiatan

keagamaan merupakan sumbangsih Lembaga Perkreditan Desa terhadap kegiatan keagamaan bagi desa setempat yang meliputi peran serta pada kegiatan pembangunan tempat ibadah, sarana ibadah, pengadaan buku dan literature agama, penyuluhan agama (dharma wacana), pesraman agama, kursus bebantenan, pelestarian lontar dan kursus aksara bali.

Penelitian akan dilakukan di Kota Denpasar, dengan jumlah LPD sebanyak 30 LPD. Tersebar di Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Selatan, Denpasar Barat dan Denpasar Utara, dengan menyebarkan quisioner pada pengurus LPD. Untuk keberhasilan (laba) dapat dilihat perkembangan LPD kota Denpasar dalam periode tahun 2009 – 2012 dalam laporan rugi / laba pada Pembina Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten/Kota (PLPDK).

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah kuesioner pertanyaan. Kuesioner adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan menyebarkan daftar pertanyaan pada ketua lembaga perkreditan desa se Kota Denpasar. Dalam penelitian ini dibuat kuesioner tentang kegiatan sosial, budaya dan kegiatan agama, di masing-masing responden yang tersebar di 30 LPD yang ada di Kota Denpasar.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan persamaan regresi untuk variabel dependen adalah keberhasilan LPD. Variabel independen adalah kegiatan sosial, kegiatan budaya dan kegiatan agama. Hipotesis penelitian diuji pengaruhnya dengan uji F (uji simultan) dan Uji t (uji parsial) dengan $\alpha = 5\%$.

Analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian terbukti signifikan atau tidak signifikan, dengan persamaan :

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 \dots\dots\dots (1)$$

Dimana:

- Y = keberhasilan LPD / laba
 a = konstanta
 x1 = kegiatan sosial
 x2 = kegiatan budaya
 x3 = kegiatan agama

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian validitas menunjukkan sejauh mana ukuran tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2007:109). Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Uji validitas dilakukan pada setiap butir pertanyaan. Hasil r hitung dibandingkan dengan r tabel. Dimana $df=n-2$, sig. sebesar 0,05. Dari hasil pengujian diperoleh r tabel 0,312 ($df=30-2=28$), sedangkan nilai hitung seperti pada Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4.

Tabel 2.
Hasil pengujian Variabel X₁

Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0,439	0,312	Valid
Pertanyaan 2	0,340	0,312	Valid
Pertanyaan 3	0,354	0,312	Valid
Pertanyaan 4	0,404	0,312	Valid
Pertanyaan 5	0,599	0,312	Valid
Pertanyaan 6	0,495	0,312	Valid
Pertanyaan 7	0,548	0,312	Valid
Pertanyaan 8	0,548	0,312	Valid
Pertanyaan 9	0,322	0,312	Valid
Pertanyaan 10	0,372	0,312	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2014

Tabel 3.
Hasil pengujian Variabel X₂

Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0,829	0,312	Valid
Pertanyaan 2	0,884	0,312	Valid
Pertanyaan 3	0,836	0,312	Valid
Pertanyaan 4	0,904	0,312	Valid
Pertanyaan 5	0,869	0,312	Valid
Pertanyaan 6	0,775	0,312	Valid
Pertanyaan 7	0,820	0,312	Valid
Pertanyaan 8	0,928	0,312	Valid
Pertanyaan 9	0,502	0,312	Valid
Pertanyaan 10	0,348	0,312	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2014

Tabel 4
Hasil pengujian r tabel ,Variabel X₃

Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0,846	0,312	Valid
Pertanyaan 2	0,891	0,312	Valid
Pertanyaan 3	0,800	0,312	Valid
Pertanyaan 4	0,677	0,312	Valid
Pertanyaan 5	0,776	0,312	Valid
Pertanyaan 6	0,827	0,312	Valid
Pertanyaan 7	0,793	0,312	Valid
Pertanyaan 8	0,753	0,312	Valid
Pertanyaan 9	0,896	0,312	Valid
Pertanyaan 10	0,860	0,312	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2014

Pengujian reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan serta konsistensi suatu alat pengukur dalam mengukur gejala yang sama. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2007:110). Menurut Nunnally dalam Ghazali (2006:42) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Tabel 5.4 menunjukkan besarnya nilai *Cronbach Alpha* masing-masing variabel.

Tabel 5.
Nilai Cronbach Alpha

Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
X1	0,774	Reliabel
X2	0,942	Reliabel
X3	0,957	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2014

Penggunaan alat statistik regresi berganda mensyaratkan dilakukannya pengujian asumsi klasik agar model regresi yang diperoleh dari kuadrat terkecil menghasilkan *Best Linier Unbiased Estimator (BLUES)*, sehingga hasil perhitungan dapat diinterpretasikan dengan efisien dan akurat.

Asumsi klasik yang pertama diuji adalah normalitas yang bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Hasil pengujian diperoleh sig. K-S = 0,943 Karena sig. K-S > 0,05, maka data yang diolah memiliki residual.

Tabel 6.
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.10340286
Most Extreme Differences	Absolute	.09
	Positive	.09
	Negative	-.096
Kolmogorov-Smirnov Z		.52
Asymp. Sig. (2-tailed)		.94

Sumber: Data diolah, 2014

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* atau *variance inflation factor (VIF)*.

Tabel 7.
Uji Multikolinearitas (Tolerance dan VIF)

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
X1	0,374	2,676	tdk ada multikolinearitas
X2	0,143	6,997	tdk ada multikolinearitas
X3	0,145	6,880	tdk ada multikolinearitas

Sumber: Data Primer diolah, 2014

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi dan menunjukkan adanya kolonieritas yang tinggi. Jika nilai *tolerance* lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada multikolinearitas. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan persamaan regresi untuk variabel dependen adalah keberhasilan LPD. Variabel independen adalah kegiatan sosial, kegiatan budaya dan kegiatan agama. Hipotesis penelitian diuji pengaruhnya dengan Uji t (uji parsial).

Hasil Pengujian dari Uji t dalam penelitian ini menggunakan alat bantuan SPSS hasilnya pada tabel 8, dapat dilihat bahwa kegiatan sosial (x1), berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan LPD, dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,017 lebih kecil atau dibawah 0,05. Dapat disimpulkan, bahwa secara signifikan kegiatan sosial berpengaruh signifikan terhadap laba LPD. Sehingga hipotesis I yang dirumuskan dalam dalam penelitian ini bahwa kegiatan sosial yang dilakukan LPD di masyarakat kota Denpasar ikut menunjang laba lembaga perkreditan desa terbukti. Artinya apabila kegiatan sosial yang dilakukan LPD di masyarakat kota denpasar meningkat maka akan terjadi peningkatan laba lembaga perkreditan desa (semakin berhasil). Karena pada umumnya dengan adanya pemberdayaan sebagian laba LPD terhadap masyarakat melalui berbagai pelaksanaan kegiatan sosial yang diberikan

kepada masyarakat maka partisipasi aktif anggota masyarakat desa pekraman memanfaatkan produk-produk LPD juga diharapkan semakin meningkat sebagai wujud rasa turut memiliki dan akhirnya akan mempengaruhi laba LPD

Tabel 8.
Hasil Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,062	,088		,703	,488		
	X1	,019	,049	,169	2,380	,017	,374	2,676
	X2	,180	,082	,158	2,191	,038	,143	6,997
	X3	,145	,070	,856	2,994	,000	,145	6,880

Sumber : Data diolah, 2014.

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa kegiatan budaya (x2), berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan LPD, dengan nilai probabilitas signifikansi kegiatan budaya sebesar 0,038. Hal tersebut menunjukkan bahwa probabilitas signifikasinya dibawah 0,05. Dapat disimpulkan, bahwa secara signifikan kegiatan budaya yang dilakukan LPD di masyarakat berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan LPD. Sehingga hipotesis II yang dirumuskan dalam dalam penelitian ini bahwa kegiatan budaya yang dilakukan LPD di masyarakat kota Denpasar ikut menunjang keberhasilan lembaga perkreditan desa terbukti. Artinya apabila kegiatan budaya di masyarakat kota denpasar meningkat maka akan terjadi peningkatan laba lembaga perkreditan desa (semakin berhasil).

Kegiatan agama (x3), berpengaruh signifikan terhadap laba LPD, dengan nilai probabilitas signifikansi kegiatan agama sebesar 0,000 dan probabilitas signifikasinya

tersebut dibawah 0,05. Dapat disimpulkan, bahwa secara signifikan kegiatan agama yang dilaksanakan LPD di masyarakat berpengaruh signifikan terhadap laba LPD. Sehingga hipotesis III yang dirumuskan dalam dalam penelitian ini bahwa kegiatan agama yang dilakukan LPD di masyarakat kota Denpasar ikut menunjang laba lembaga perkreditan desa terbukti. Artinya apabila kegiatan agama yang dilakukan oleh LPD di masyarakat kota denpasar meningkat maka akan terjadi peningkatan laba lembaga perkreditan desa (semakin berhasil).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data yang telah dilakukan serta pembahasan atas hasil pengujian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka yang dapat disimpulkan bahwa Kegiatan sosial (x1), kegiatan budaya(x2) dan kegiatan keagamaan (X3) yang dilakukan LPD di masyarakat desa setempat, berpengaruh signifikan terhadap Laba LPD, Artinya, bahwa kegiatan sosial, kegiatan budaya, dan kegiatan agama yang dilakukan LPD di masyarakat kota Denpasar ikut menunjang laba LPD dan apabila LPD meningkatkan sumbangsihnya dan keikutsertaannya pada kegiatan-kegiatan ini di masyarakat desa setempat maka akan terjadi peningkatan laba lembaga perkreditan desa. maka disarankan kepada lembaga perkreditan desa untuk terus aktif dan meningkatkan keikutsertaannya dalam kegiatan sosial, budaya dan keagamaan karena selain mampu meningkatkan laba kegiatan ini dipercaya mampu menjaga sustainabilitas dan *going concern* lembaga.

REFERENSI

- Alfian, 1985. Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan. PT. Gramedia, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pusat Statistik, Tahun 2008. Profil Kota Denpasar, Denpasar 2008.
- Craib. 1986. Teori-Teori Sosial Modern. CV. Rajawali, Jakarta.
- Compbell. 1994. Tujuh Teori Sosial. Kanisus.
- George Retzer. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Jakarta : PT.Gajah Grafindo Persada, Jakarta.
- Gorda, I. G. N. 1994. Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Ekonomi. Denpasar Widya Kriya Gematama.
- _____, 1999. Manajemen Dan Kepemimpinan Desa Adat Di Provinsi Bali. Denpasar Widya Kriya Gematama
- _____, 2003. Membudayakan Kerja Berdasarkan Dharma. Pusat Kajian Hindu, Budaya dan Prilaku Organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja Jalan Yudistira II Singaraja.
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Immanuel Wlurstein. 1997. Lintas Batas Ilmu Sosial, Yogyakarta : L Kis.
- Indriyo Gitosudarmo ; Agus Mulyono. 2001. Prinsip Dasar Management, BPFE Yogyakarta
- J. M. A. Tahuteru, 1968. Prinsip-Prinsip Managemen, Bhatara 1968, Jakarta. John F. Mce, Department or Management, 1952
- Kaho. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Cetakan Pertama,Rajawali, Jakarta.
- Kantor Dokumentasi Budaya Bali Provinsi Daerah Tingkat I Bali. 1999. Tutur Buddha Sawenag (Ahli Aksara dan Ahli Bahasa), Denpasar.
- Kotler, Philip, Management Pemasaran, Jakarta. PT. Prenhallindo, 1997.

- Mantra, I. B. 1993. *Kebudayaan Dan Kepribadian Bangsa*, Upadasastra.
- _____, 1996. *Landasan Kebudayaan Bali*. Yayasan Dharma Sastra Denpasar.
- Mudrajad Kuncoro 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*
- Pitana. 1994. *Dinamika Masyarakat Dan Kebudayaan Bali*, BP.
- Rasyid, 1997. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintah dan Politik Order Baru*, Jakarta, Yarsit Watampone
- Taliziduhu Ndraha, 1990. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Titib. 2001. *Teknologi & Simbol-Simbol Dalam Agama Hindu*. Badan Litbang Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, bekerja sama dengan Paramita Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Otonomi Daerah Citra Umbara, Bandung 2003.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali, Nomor 8 Tahun 2002, tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Biro Hukum dan Ham Setda Provinsi Bali.
- W. Geriya. 2000. *Tranformasi Kebudayaan Bali memasuki abad XXI* Denpasar.
- Yudha Triguna 2000. *Mengenal Teori-Teori Pembangunan*, Denpasar : Widya Dharma.